

Volume 11 Nomor 2 Agustus 2026
E-ISSN 2541-0938 P-ISSN 2657-1528

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI JURKAMI

JURKAMI

VOLUME 11
NOMOR 2

SINTANG
AGUSTUS
2026

DOI
10.31932

E-ISSN
2541-0938
P-ISSN
2657-1528

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN LINGKUNGAN BIROKRASI
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA SKPD DI KOTA BANDA ACEH**

Ifra Zachrand 'Athaya

Program Studi Akuntansi Universitas, Muhammadiyah Aceh, Indonesia

✉Corresponding Author Email: ifrazachrand9@gmail.com

Author Email : ifrazachrand9@gmail.com

Abstract:

Article History:
Received: September
2025
Revision: March 2026
Accepted: March 2026
Published: August
2026

Keywords:
Budget Planning;
Bureaucratic
Environment; Budget
Absorption; SKPD;
Public Sector
Programs.

This study examines the influence of budget planning and bureaucratic environment on budget absorption in Regional Work Units of Banda Aceh City. Budget absorption is a key indicator of the effectiveness and success of public sector programs and activities. The research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis to test the relationship between budget planning, bureaucratic environment, and budget absorption. Data collection was carried out using structured questionnaires distributed to Regional Work Units officials directly involved in financial management processes. The findings demonstrate that both budget planning and bureaucratic environment have significant and positive effects on budget absorption, both partially and simultaneously. Effective budget planning ensures the timeliness and precision of program implementation, while a supportive bureaucratic environment facilitates better coordination and minimizes administrative delays. This study provides critical insights for local governments to enhance the efficiency of budget management and improve public service delivery, ultimately contributing to better public welfare.

Abstrak:

Sejarah Artikel:
Diterima: September
2025
Direvisi: Maret 2026
Disetujui: Maret 2026
Diterbitkan: Agustus
2026

Kata kunci:
Perencanaan
Anggaran; Lingkungan
Birokrasi;
Penyerapan Anggaran;
SKPD; Program Sektor
Publik.

Penelitian ini mengkaji pengaruh perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh. Penyerapan anggaran merupakan indikator kunci efektivitas dan keberhasilan program serta kegiatan sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara perencanaan anggaran, lingkungan birokrasi, dan penyerapan anggaran. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada pejabat SKPD yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, baik secara parsial maupun simultan. Perencanaan anggaran yang efektif memastikan ketepatan waktu dan presisi pelaksanaan program, sedangkan lingkungan birokrasi yang mendukung memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dan meminimalkan hambatan administratif. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



How to Cite: Ifra Zachrand Athaya. 2026. PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN LINGKUNGAN BIROKRASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA SKPD DI KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 11 (2), DOI: <https://doi.org/10.31932/jpe.v11i2.5277>

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik (Yamin, 2022:79). Secara normatif, proses penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam mewujudkan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. RKPD tersebut merupakan kumpulan dari seluruh program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwujudkan dalam bentuk rencana sasaran strategi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan format tersebut

maka penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah menjadi stimulus dalam meningkatkan tanggung jawab dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara di seluruh Indonesia.

Anggaran pemerintah daerah Kota Banda Aceh yang direncanakan dan dialokasikan untuk pelaksanaan rencana program kerja pemerintah di 15 SKPD menjadi instrument kebijakan yang penting untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh. Namun berbagai masalah telah terjadi sehingga tingkat realisasi anggaran sebagaimana terlihat dalam LAKIP tidak seluruhnya dapat tercapai secara efektif. Rencana dan realisasi anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)
2020	1,371,173,195,544	1,251,360,137,222	91,26%
2021	1.332.172.790.386	1.207.614.088.958	90.65%
2022	1.410.626.047.131	1.334.504.795.398	94.60%

Sumber: LKjip Pemerintah Kota Banda Aceh 2020-2022

Tabel 1 menjelaskan tingkat penyerapan anggaran belanja pemerintah Kota Banda Aceh selama tahun 2020 dan 2022 relatif berfluktuasi sejalan dengan kualitas anggaran yang direncanakan serta kemampuan dan upaya SKPD dalam melaksanakan program kerja secara efektif. Selama tahun 2020 dan 2022 tingkat penyerapan anggaran pemerintah Kota Banda Aceh sudah dapat dikatakan efektif

dengan tingkat penyerapan anggaran rata-rata melebihi dari 85%. Tahun 2020 tingkat penyerapan anggaran pemerintah Kota Banda Aceh telah mencapai 91,26%. Setelah mengalami penurunan 90,65% pada tahun 2021, tingkat penyerapan anggaran pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2022 kembali meningkat dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 94,60%.



Adanya kecenderungan mengajukan usulan anggaran yang lebih besar dari yang dibutuhkan dengan anggapan bahwa usulan tersebut nantinya tidak akan disetujui semua. Kemudian lemahnya kemampuan pejabat daerah dalam membuat perencanaan yang berkualitas serta adanya kecenderungan pejabat daerah untuk memperbesar alokasi anggaran untuk belanja pegawai sering membuat SKPD di Kota Banda Aceh menghadapi tindakan revisi terhadap DIPA. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan jadwal kegiatan harus dilakukan penyesuaian, dan waktu pelaksanaan menjadi mundur. Akibatnya kegiatan dan program kerja belum dapat dilaksanakan sebelum persetujuan revisi DIPA tersebut disahkan, karena kegiatan dan program tersebut dapat dikategorikan belum ada alokasi anggaran akhirnya sering terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun (Ratag et al., 2019).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahap yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2018).

Secara sederhana penyerapan anggaran menurut Yanuriza et al (2019) adalah membandingkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah direalisasikan. Mardiasmo (2009) dalam Ramopolii et al (2022) mengatakan penyerapan anggaran adalah menggambarkan kemampuan pemerintah

daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Menurut Rahayu (2020) penyerapan anggaran pada satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang akuntabel dan memenuhi prinsip value of money merupakan salah satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah. Kemudian Kuncoro dalam Harahap (2020) mengatakan penyerapan anggaran yaitu “suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi”.

Kemudian menurut Hadiutomo (2021), perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa, dan bagaimana. Perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Robbins dan Coulter dalam Tisnawati dan Saefullah (2018) mendefinisikan perencanaan adalah sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.

Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Tidak adanya perencanaan

penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Mardiasmo (2018).

Birokrasi adalah skema pengorganisasian mendasar dalam melaksanakan norma dan pelayanan. Menurut Rerung et al., (2018), birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi menurut Ningsih et al., (2023: 50) birokrasi menunjuk pada empat pengertian, yaitu pertama, menunjuk pada kelompok pranata atau lembaga tertentu. Kedua, menunjuk pada metode khusus untuk mengalokasikan sumber daya dalam suatu organisasi pemerintah untuk pengambilan keputusan.

Penelitian Furqana dan Dian (2022) dengan judul pengaruh perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran: studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian dapat membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran. Engkus, et al., (2020) dengan judul “Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung” menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Hasil penelitian adalah dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat Teoritis, Memberikan

informasi aktual bagi masyarakat ilmiah berkenaan dengan penelitian lanjutan dan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik melalui tersedianya bahan referensin yang berkaitan dengan pengaruh perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran. Praktis, Memberikan suatu keputusan yang aktual bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan penyerapan anggaran dengan dukungan perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil pembagian kuesioner. Menurut Indriantoro dan Supomo (2018), data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner. Kuesioner menurut Indriantoro & Supomo (2018) yaitu penggunaan teknik pengisian jawaban yang disampaikan langsung dari responden. Kuesioner diberikan kepada responden dengan tujuan agar responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan tema sentral penelitian. Kuesioner diberikan bobot skala Likert sesuai tingkat kepentingan.

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefisient of Corelation* dengan bantuan program SPSS, dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperbolehkan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *Product Moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa item pertanyaan



mempunyai korelasi di atas 5% atau secara statistik terdapat konsistensi internal (*internal consistency*) yang berarti item-item pertanyaan dapat mengukur aspek yang sama. Ini berarti bahwa setiap data yang ditunjukkan adalah valid.

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Untuk menguji keandalan alat ukur dalam penelitian ini penulis menggunakan uji reliabilitas internal, dengan cara menganalisis data dari satu kali pengetesan saja. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Metode reliabilitas yang digunakan adalah *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS Versi 22. Alat ukur yang bagus harus:

1. Dapat diandalkan
2. Hasil pengukurannya bisa diramalkan
3. Dapat menunjukkan tingkat ketepatan

Tabel 2. Persepsi Berdasarkan Likert Skor

Rata-rata Skor	Kategori
1,00 – 1,80	Sangat tidak baik
1,81 – 2,60	Tidak baik
2,61 – 3,40	Kurang baik
3,41 – 4,20	Baik
4,21 – 5,00	Sangat baik

Sumber: Suryana (2015)

Untuk memberikan gambaran pencapaian dari setiap variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria rata-rata skor dari jawaban responden. Jika diperoleh rata-rata skor di atas 3,41, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum responden memberikan respon setuju atau

Cronbach Alpha menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,60.

Analisis persepsi responden berguna untuk menganalisis persepsi responden dalam menjawab setiap butir pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Peralatan analisis data untuk menguji persepsi responden dengan menghitung nilai rerata dan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori penilaian persepsi responden. Rentang skor dihitung dengan membagi selisih antara nilai tertinggi dengan skor terendah dengan jumlah pilihan skor jawaban kuesioner. Selanjutnya, penggolongan persepsi responden akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

baik terhadap setiap item pertanyaan dalam kuesioner.

Peralatan analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi yaitu suatu bentuk peralatan analisis yang dirumuskan dalam bentuk persamaan matematis

yang berguna untuk mengetahui pengaruh antara variable bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Penelitian ini menggunakan rancangan analisis regresi linier berganda (Ratag et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Statistik Deskriptif

N		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Anggaran	30	24	30	27.24	2.000
Lingkungan Birokrasi	30	12	15	13.58	1.200
Penyerapan Anggaran	30	12	15	13.76	1.347
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25 (2024)

Tabel 3 hasil SPSS di atas memperlihatkan deskripsi variabel dalam penelitian ini secara statistic. Minimum adalah nilai terendah dari total nilai pertanyaan setiap variabel, sedangkan Maksimum adalah nilai tertinggi nilai pertanyaan setiap variabel.

1. Perencanaan Anggaran (X1)
Perencanaan anggaran memiliki nilai minimum sebesar 24, untuk nilai maksimum sebesar 30, rata- rata nilai dari total pertanyaan adalah 27,24 dengan standar deviasi 2.000.
2. Lingkungan Birokrasi (X2)
Lingkungan birokrasi memiliki nilai minimum sebesar 12, untuk nilai maksimum sebesar 15, rata- rata nilai dari total pertanyaan adalah 13,58 dengan standar deviasi 1.200.
3. Penyerapan Anggaran (Y)
Penyerapan anggaran memiliki nilai minimum sebesar 12, untuk nilai maksimum

Statistik deskriptif merupakan gambaran variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu perencanaan anggaran (X1), lingkungan birokrasi (X2) dan penyerapan anggaran (Y). Berdasarkan hasil kuisioner yang menunjukkan hasil analisis deskriptif dari masing-masing variabel sebagai berikut:

sebesar 15, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 13,76 dengan standar deviasi 1.347

Pengujian kualitas data yang telah diperoleh ataupun dikumpulkan dari pengisian kuesioner dapat diuji dan dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas yang dinyatakan dengan hasil koefisien korelasi dari Cronbach Alpha, instrumen harus memenuhi persyaratan utama yaitu valid dan reliabel.

Uji validitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah secara statistik, yaitu menggunakan pengujian Pearson product-moment coefficient of correlation dengan pengaplikasian program SPSS 26. Hasil analisis data menampilkan bahwa seluruh pernyataan/pertanyaan memiliki level, jika nilai korelasi yang didapatkan diatas nilai kritis 5% (>0.1986), maka disimpulkan bahwa item pertanyaan atau pernyataan memiliki signifikansi dan

validitas konstruk (internal consistence). Perolehan data yang valid dengan pengujian ini dapat dilanjutkan untuk

melakukan analisis-analisis selanjutnya. Hasil pengujian validitas data ditampilkan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

No. Pernyataan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5% (N=30)	Ket
X1.1	Perencanaan Anggaran	0,735	0,3061	Valid
X1.2		0,814		
X1.3		0,635		
X1.4		0,697		
X1.5		0,541		
X1.6		0,558		
X2.1	Lingkungan Birokrasi	0,810	0,3061	Valid
X2.2		0,759		
X2.3		0,780		
Y.1	Penyerapan Anggaran	0,965	0,3061	Valid
Y.2		0,906		
Y.3		0,840		

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid, hal ini didasari dengan perolehan nilai kritis korelasi product moment berada di bawah nilai koefisien korelasi dari setiap variabelnya. Sehingga semua pertanyaan per pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dapat dinyatakan valid dan bisa digunakan untuk analisis selanjutnya yang lebih rinci karena telah memenuhi syarat

untuk dilakukan pengujian-pengujian selanjutnya.

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah pertama. Pengujian

ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel PerA (Perencanaan Anggaran) dan LB (Lingkungan Birokrasi) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y (Penyerapan anggaran).

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada Tabel 4.13, nilai koefisien regresi PerA dan LB masing-masing sebesar 0,296 dan 0,536. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel PerA akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,296, dan setiap peningkatan satu unit pada variabel LB akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,536. Koefisien konstanta sebesar -1,586 menunjukkan nilai dasar dari Y saat semua variabel independen bernilai nol.

Selanjutnya, berdasarkan nilai t-hitung, variabel PerA memiliki t-value sebesar 3,303 ($p = 0,002$), sedangkan variabel LB memiliki t-value sebesar 3,582 ($p = 0,001$). Kedua nilai ini memiliki tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa PerA dan LB berpengaruh signifikan terhadap Y.

Hasil pengujian hipotesis kedua merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang kedua. Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini akan menjawab apakah pembelian dari pihak berelasi berpengaruh positif terhadap laba usaha perusahaan.

Berdasarkan Tabel 4 terlihat nilai koefisien beta (β) pembelian dari perencanaan anggaran sebesar 0,296. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,296 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta pembelian dari pihak berelasi tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a2} diterima, artinya perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Hasil pengujian hipotesis ketiga merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang ketiga. Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini akan menjawab apakah lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan Tabel 4 terlihat nilai koefisien beta (β) penjualan kepada pihak berelasi sebesar 0,536. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,536 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a3} diterima, artinya lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Nilai koefisien beta (β_1) pembelian dari pihak berelasi sebesar 0,296. Nilai ini tidak sama dengan nol ($0,296 \neq 0$). Dengan demikian maka H_{a1} diterima. Artinya bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh. Penelitian ini sejalan dengan temuan Furqana dan Handayani (2022), yang mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran yang matang dapat memengaruhi tingkat penyerapan anggaran secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran sangat

penting dalam menentukan keberhasilan realisasi anggaran. Perencanaan anggaran yang baik memberikan kerangka kerja yang jelas dan terarah bagi pelaksanaan program kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada efektivitas penggunaan dana publik.

Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran berfungsi sebagai panduan bagi SKPD dalam menentukan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan. Berdasarkan teori Goal Setting, penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis dapat mendorong organisasi mencapai target dengan lebih efektif. Dalam konteks ini, perencanaan anggaran yang komprehensif, terperinci, dan berbasis pada prioritas menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap program kerja dapat berjalan dengan baik. Perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait juga memungkinkan adanya keterbukaan, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap penggunaan anggaran.

Literasi keuangan diukur dengan lima indikator yang mencakup pengetahuan dan keterampilan dasar dalam memahami serta mengelola keuangan usaha. (Ni Nyoman et al., 2025) Keterlambatan ini tidak hanya mengganggu pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dapat menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap setiap aspek perencanaan agar target serapan anggaran dapat dicapai secara optimal.

Pengaruh Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, Lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap

penyerapan anggaran. Nilai koefisien beta (β_2) lingkungan birokrasi sebesar 0,536. Nilai ini tidak sama dengan nol ($0,536 \neq 0$). Dengan demikian maka H_{a2} diterima. Artinya bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan bahwa Lingkungan birokrasi yang kondusif juga terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di SKPD Kota Banda Aceh. Hasil ini mendukung penelitian Temalagi dan Korneles (2021), yang menyebutkan bahwa faktor seperti koordinasi antarpegawai, jumlah tenaga kerja yang memadai, serta pemahaman pegawai terhadap regulasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran. Lingkungan birokrasi yang terstruktur dengan baik mampu meminimalkan hambatan teknis dan administratif, sehingga mempercepat proses pencairan dan pelaksanaan anggaran.

Lingkungan birokrasi yang ideal ditandai dengan adanya komunikasi yang efektif antarpegawai, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta penerapan aturan kerja yang jelas. Koordinasi yang baik antarpegawai memastikan setiap tugas dapat dikerjakan sesuai jadwal, sementara jumlah tenaga kerja yang mencukupi memungkinkan beban kerja dapat didistribusikan secara merata. Selain itu, pemahaman pegawai terhadap regulasi menjadi kunci dalam mengurangi kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses penyerapan anggaran.

Namun, lingkungan birokrasi yang tidak efisien sering kali menjadi penyebab utama lambatnya realisasi anggaran.

Kebiasaan menunda pekerjaan, kurangnya koordinasi, atau kendala teknis lainnya dapat mengakibatkan program kerja tertunda, yang pada akhirnya memengaruhi capaian penyerapan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan, penyederhanaan proses administrasi, dan penguatan koordinasi antarunit menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran.

Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi secara Bersama Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel Perencanaan Anggaran (PerA) dan Lingkungan Birokrasi (LB) tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$ dan $\beta_2 \neq 0$). Hal ini berarti hipotesis pertama (H_{a3}) diterima. Dengan demikian, Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat Penyerapan Anggaran pada suatu instansi atau organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas Perencanaan Anggaran dan kondisi Lingkungan Birokrasi. Berdasarkan nilai F-Sig sebesar 0,000, pengaruh kedua variabel ini secara simultan signifikan terhadap variabel dependen. Ini mengindikasikan bahwa semakin baik perencanaan anggaran dan semakin kondusif lingkungan birokrasi, semakin optimal penyerapan anggaran yang terjadi.

Pengaruh ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran yang efektif, mulai dari pengidentifikasian kebutuhan, penyusunan prioritas, hingga pengalokasian sumber daya, menjadi kunci utama dalam memaksimalkan penyerapan

anggaran. Di sisi lain, lingkungan birokrasi yang mendukung, seperti prosedur yang transparan, koordinasi yang baik, dan pengurangan hambatan administratif, dapat memperlancar pelaksanaan anggaran.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kontribusi kedua variabel independen terhadap penyerapan anggaran tercermin dari nilai Adjusted R^2 sebesar 0,677. Artinya, sekitar 67,7% variasi dalam penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Fluktuasi dalam tingkat penyerapan anggaran, baik berupa peningkatan maupun penurunan, mencerminkan dinamika perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi. Dengan kata lain, kedua variabel ini saling mendukung untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat terserap dengan baik sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Furqana dan Handayani (2022), yang menyatakan bahwa kualitas perencanaan anggaran dan efisiensi birokrasi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan kualitas Perencanaan Anggaran dan pembenahan Lingkungan Birokrasi dapat mendorong optimalisasi dalam penggunaan anggaran, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi atau pemerintahan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, berikut beberapa jawaban yang dapat dijabarkan untuk pemerintah daerah, khususnya SKPD di Kota Banda Aceh. SKPD perlu meningkatkan koordinasi antarpegawai melalui rapat berkala, pembagian tugas yang jelas, dan komunikasi yang lebih efektif. Dalam mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan anggaran, pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem manajemen keuangan berbasis elektronik. Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pegawai SKPD dalam menyusun anggaran yang lebih komprehensif, prioritas, dan berbasis data yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Alfayuni, Firda dan Neneng Dahtiah. 2021. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran dan Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Cirebon). Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung, Vol 4 No 5 Hal 1121-1127. Politeknik Negeri Bandung, Bandung

Ani, Lely., JMV Mulyadi., Dwi Pratowo. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Perencanaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. Ekobisman Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen Vol 5 No 1 Universitas Pancasila.

Arif Soyan Mirrian et.al. 2019. Manajemen Pemerintah, Jakarta: Universitas Terbuka.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2011).

Menyoal Penyerapan Anggaran.
Yogyakarta: Paris Review

Dewi Fatmawati dan Siti Aliyah. 2022. Analisis Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Dengan Menggunakan Anggaran (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara) Ekobis Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, Vol. 6, No. 2

Dr. Ni Nyoman Juli Nuryani, Putu Sonia Mellya Utami, Mertayani Sari Dewi. 2025. Pengaruh Penggunaan Financial Technology Literasi Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM. JURKAMI Volume 10, Nomor 3, 2025.

Elim, Meyulinda Aviana., Deasy Susana Ndaparoka, Thobias Elianus David Tomasowa. 2018. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Kupang Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit Vol. 3 No. 2,

Engkus, Endang Hermawan dan Endah Dwi Rahmawati. 2020. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. JURNAL PAPATUNG: Vol. 3 No. 2 Tahun 2020

Fajar, Nurul dan Muhammad Arfan. 2017. Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 10 No. 2, Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Fauzan . 2020. Budgetary Slack pada Anggaran Sektor Publik. Bogor: Guepedia



- Furqana, S., & Dian, F, H. 2022. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10(3), 215-230.
- Gagola, Ledy S., Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L. Warongan. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud *Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- Hadiutomo, Kusno. 2021. *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Dan Terdesentralisasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Hantono, Lakharis Inuzula, Sri Apriyanti Husain. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Barat Media Sain Indoensia.
- Harahap, Sasmita Atika Sari., Taufeni Taufik dan Nurazlina. 2020. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Lingkungan birokrasi, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vol. 13, No. 1 Universitas Riau, Program Studi Akuntansi.
- Hartoto., Tatmimah, Itat., Endraria. 2023. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi Dan Manajemen*”, Yogyakarta: BPFE
- Ramdhani, Dadan dan Indi Zaenur Anisa. 2017. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* Vol.10 No.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Ramopolii, Jingsi Virginia., Paulina Van Rate dan Joubert B. Maramis. 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara
- Rerung, et al. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, Vol 3 No 1 Hal 192-201
- Rindawati, Septi. 2021. *Responsibilitas Pengelolaan APBD*. Bandung Media sain Indoensia
- Rizal. Taufik. 2020. Pengaruh Bank Syariah Terhadap Produksi Jagung di Madura. Prosiding. Seminar Nasional Kedaulatan Pangan Bangkalan Suabaya: 119-159.
- Sinaga, Edward James. 2018. Analisis Lemahnya Penyerapan Anggaran Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, *Jurnal Rechtvinding* Vol 5 No 2 Pusat Pengkajian dan Pengembangan, Kemnetrian Hukum mdan HAM.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Refika.

Sujatmika. 2020. Menuju Penganggaran
Daerah Berdasarkan Pancasila.
Malang Peneleh.

